

# Evaluasi Penggunaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Simpang Tanah Lapangan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

Rainan Rusdi,Sahri Muharam

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi  
Email : [rainanrusdi@gmail.com](mailto:rainanrusdi@gmail.com),[sahrimuharampku@gmail.com](mailto:sahrimuharampku@gmail.com)

## Abstrak

*Terbitnya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya didukung Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi sebuah titik awal bagi desa untuk menunjukkan peran dan kemampuan atas dirinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jhon Creswell mendefinisikan penelitian kualitatif dapat disimpulkan belum mencapai tujuan umum dana desa yang telah ditetapkan.*

**Kata kunci,evaluasi,Desa**

## ABSTRACT

*Implementing Regulations of Law Number 6 of 2014 concerning Villages became a starting point for villages to show their roles and abilities over themselves. The research method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach. John Creswell defines that qualitative research can be concluded that it has not achieved the general objectives of village funds that have been set.*

**Keywords,evaaluasion,Village**

## Latar Belakang

Indonesia saat ini terus mengupayakan peningkatan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah serta pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Pembangunan-pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional mempunyai tujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga meningkatkan kemampuan daerah dalam pengelolaan sumber daya ekonomi secara efisien untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Terbitnya Undang- Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya didukung Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi sebuah titik awal bagi desa untuk menunjukkan peran dan kemampuan atas dirinya.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa

menurut UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut: “Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan

Desa Simpang Tanah Lapang merupakan salah satu desa di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yang menerima Dana Desa Tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Desa Nomor: 003/BA-BPD/2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 berjumlah Rp. 976.477.000,- dengan rincian:

**Tabel 1.1 Rancangan Anggaran Pendapatan**

**Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH ANGGARAN Rp.</b>	<b>SUMBER</b>
1	Dana Desa	743.363.000	APBN
2	Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten	19.039.000	BDHPDRD
3	Alokasi Dana Desa dari APBD Kabupaten	214.075.000	ADD
<b>JUMLAH</b>		<b>976.477.000</b>	

**Sumber: Kantor Desa Simpang Tanah Lapang Kuantan Hilir 2018.**

Dalam pelaksanaan pembangunannya, berdasarkan Pasal 81 UU Desa menyatakan bahwa pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan

sumber daya alam Desa. Pada ayat (4) pasal 81 ini ditegaskan bahwa pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa. Sedangkan pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

Kegiatan Pembangunan di Desa Simpang Tanah Lapang berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Simpang Tanah Lapang Tahun 2017 dengan Jumlah Anggaran adalah sebesar Rp.

713.484.800,- Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2017 Desa Simpang Tanah Lapang tersebut sebagai berikut:

**Table 1.2 Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017**

NO	KEGIATAN PEMBANGUNAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	SUMBER
1	Pembangunan saluran drainase	72.282.300	APBN
2	Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air bersih berskala desa	206.043.500	APBN
3	Pembangunan Gedung PAUD	435.159.000	APBN

**Sumber: Kantor Desa Simpang Tanah Lapang Kuantan Hilir 2018**

Untuk pembangunan saluran drainase ini Kepala Desa Simpang Tanah Lapang mengumpulkan warga untuk Rapat dan memberitahukan dimana akan dibuat Drainase agar tetap melibatkan masyarakat setempat. Pada tahap pelaksanaan, masyarakat yang berpartisipasi dalam proses pembangunan ini. Mereka memilih untuk melaksanakan sendiri pembangunan drainase tersebut. Tetapi dalam pelaksanaannya dijumpai hal- hal sebagai berikut:

Ada sebagian masyarakat yang enggan membebaskan lahannya sehingga pemerintah desa membutuhkan waktu untuk penyelesaian pembebasan lahan tersebut yang mengakibatkan keterlambatan pengerjaannya.

Sulitnya akses transportasi bahan bangunan ke lokasi pembangunan drainase sehingga waktu pengerjaannya melebihi waktu yang telah ditetapkan.

Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air bersih berskala desa (sumur bor)

Untuk mengatasi permasalahan kekeringan air pada saat musim kemarau pemerintah desa Simpang Tanah Lapang melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air bersih (sumur bor) agar masyarakat tidak perlu bersusah payah mencari air bersih. Namun dalam kenyataannya ada terdapat sumur bor yang kondisi air yang dihasilkan tidak layak dikonsumsi untuk kebutuhan sehari- hari. Akibatnya masyarakat mencari air lagi ke

dusun tetangga sehingga pembangunan sumur bor tersebut kurang bermanfaat.

Pembangunan Gedung PAUD.

Dalam pelaksanaannya ditemui bahwa pembangunan gedung PAUD, tidak sesuai menurut standar berdasarkan Permendikbud No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD dimana gedung PAUD harus memiliki luas lahan minimal 300 m<sup>2</sup> (untuk b

## LANDASAN TEORI

### Konsep Evaluasi

Menurut Kamus Besar Indonesia, evaluasi adalah suatu penilaian dimana penilaian itu ditujukan pada orang yang lebih tinggi atau yang lebih tahu kepada orang yang lebih rendah, baik itu dari jabatan strukturnya atau orang yang lebih rendah keahliannya. Evaluasi adalah suatu proses penelitian positif dan negatif atau juga gabungan dari keduanya.

Menurut Dimiyati (1994: 98) evaluasi adalah proses sederhana memberikan/menetapkan nilai kepada sejumlah tujuan kegiatan, keputusan, petunjuk kerja, proses, orang dan masih banyak yang lainnya. Pada umumnya evaluasi adalah suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan dan yang akan digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program ke depannya agar jauh lebih baik. Evaluasi

lebih bersifat melihat ke depan dari pada melihat kesalahan-kesalahan dimasa lalu, dan ditujukan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program.

Selanjutnya W. Dunn (2000: 13) fungsi dari evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan setelah dapat dicapai melalui tindakan public

2. Evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.

3. Evaluasi memberikan sumbangan aplikasi metoda-metoda analisa kebijakan lain termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kebijakan.

4. Evaluasi dapat menyumbangkan pada definisi alternative kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternative kebijakan yang diungkapkan dan target perlu didefinisikan ulang.

Menurut William N Dunn (dalam Riant Nugroho, 2009:536), istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assesment*). Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah

dapat dicapai melalui tindakan publik; evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target; dan evaluasi memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode

**Tabel 2.1. Kriteria Evaluasi Kebijakan**

analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Secara umum, William N Dunn (dalam Riant Nugroho, 2009:537) menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik sebagai berikut:

<b>Tipe Kriteria</b>	<b>Pertanyaan</b>
Efektifitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

Menurut Wirawan (2006:12), evaluasi adalah proses pengumpulan dan menyajikan informasi mengenai objek evaluasi, menilainya dengan standar evaluasi dan evaluasinya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi.

Menurut Soemalis (1983) dalam Mardikanto, (2016: 265) Evaluasi adalah proses pengambilan keputusan melalui kegiatan membanding-bandingkan hasil pengamatan terhadap sesuatu obyek.

Menurut Siagian (2005) dalam Mulyadi (2016: 122) mendefinisikan evaluasi adalah sebagai proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. Handbook on Planning, Monitoring and Evaluating for Development Results, jenis evaluasi berdasarkan waktu dapat dibagi menjadi empat, yaitu:

1. Evaluasi *ex-ante* adalah penilaian terhadap kemungkinan pengaruh yang terjadi di masa depan.

2. Evaluasi *midterm* adalah tipe dari evaluasi *formatif*. Evaluasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pada saat fase implementasi dari program atau kegiatan

3. Evaluasi *final or terminal* merupakan tipe dari evaluasi *sumatif* karena dilakukan menjelang akhir dari fase pelaksanaan kegiatan atau program.

4. Evaluasi *ex-post*, yaitu evaluasi yang dilakukan ketika program atau kegiatan telah selesai dilakukan, bahkan biasanya dilakukan setelah 2 tahun atau lebih program atau kegiatan tersebut selesai.

Menurut Beni Setiawan, (dalam Abdul Kadir Karding, 2008) perangkat evaluasi yang dapat diukur melalui empat dimensi yaitu:

Input yaitu masukan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan. Untuk itu dikembangkan instrumen yang meliputi indikatornya:

1. Sumber daya dukungan (SDM, Uang, sarana/prasarana)

2. Bahan-bahan dasar pendukung (peralatan, teknologi)

Nlansung kepada masyarakat. Untuk itu dikembangkan instrumen yang meliputi indikatornya:

1. Tepat sasaran atau tidak

2. Tepat guna atau tidak

3. Efisien atau tidak

A. *Ouput (hasil)*. Yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan. Apakah sesuatu pelaksanaan kebijakan menghasilkan produk sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu dikembangkan instrumen dengan indikator sebagai berikut:

1. Tepat tindaknya sasaran yang ditujui.

2. Beberapa besar sasaran yang tercover.

3. Seberapa banyak kelompok sasaran yang tertangani.

4. Seberapa besar kelompok sasaran yang terlibat.

A. *Outcomes (Dampak)*. Yaitu apakah sesuatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran dengan tujuan kebijakan. Dengan indikatornya sebagai berikut:

1. Ada atau tidak perubahan pada target/sasaran.

2. Seberapa besar perubahan kelompok sasaran.

3. Seberapa signifikan perubahan yang terjadi pada kelompok sasaran.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jhon Creswell mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan

gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar alamiah (Silalahi, 2010:77).

Penelitian dengan metode deskriptif adalah penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan suatu hal seperti apa adanya, pendekatan deskriptif memungkinkan peneliti untuk memilih satu objek penelitian untuk dikaji secara mendalam. jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai Evaluasi pengelolaan dana desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, secara mendalam dan komprehensif.

### **Informan Penelitian**

Informan sebagai sumber data kualitatif yang utama disamping data-data lain yang diperoleh dari hasil studi pustaka, sehingga informan merupakan salah satu sumber data yang penting dalam penelitian ini. Pada penelitian ini, peneliti memasuki situasi sosial penelitian, melakukan

**Tabel 3.2.1 Kategori Informan**

No	Kategori Informan	Keterangan	Kode
1	Kepala Desa Simpang Tanah Lapang Kabupaten Kuantan Singingi	<i>Secondary Informan</i>	I-1 Kode Untuk Kepala Desa
2	Sekretaris Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir	<i>Key Informan</i>	I-2 Kode Untuk

observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut.

Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, mengambil sumber beberapa orang yang dianggap mempunyai informasi yang relevan dengan focus penelitian.

Penentuan informan dalam penelitian kualitatif adalah bagaimana menentukan *key informan* (informan kunci) atau situasi sosial tertentu yang sarat informasi sesuai dengan fokus penelitian. menentukan *key informan* dilakukan dengan cara pemilihan *the primary selection* (partisipan pertama), Sedangkan jika peneliti tidak dapat menentukan partisipan secara langsung, sebagai cara alternatif peneliti dapat melakukan pemilihan *secondary selection* (informan kedua). Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut ini:

	Kabupaten Kuantan Singingi		Sekretaris Desa
3	Bendahara Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi	<i>Key Informan</i>	I-3 Kode Untuk Bendahara Desa
4	Ketua BPD Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi (anggota BPD)	<i>Secondary Informan</i>	I-4 Kode untuk BPD dan anggota

No	Kategori Informan	Keterangan	Kode
5	Ketua Pemuda Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi	<i>Secondary Informan</i>	I-5 Kode Untuk Ketua Pemuda
6	Tokoh Agama Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi	<i>Secondary Informan</i>	I-6 Kode Untuk Tokoh Agama
7	Tokoh Masyarakat Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi	<i>Secondary Informan</i>	I-7 Kode Untuk Tokoh Masyarakat
8	Masyarakat Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi	<i>Secondary Informan</i>	I-8 Kode Untuk Masyarakat Desa

Sumber : Hasil Penelitian, 2018

### Sumber Data

#### Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan yang diinginkan oleh peneliti, baik melalui wawancara dengan narasumber, dan pengumpulan data lapangan lainnya. Data

primer yang dibutuhkan adalah tanggapan pemerintah desa dan masyarakat tentang penyelenggaraan otonomi desa selama ini.

#### Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek



yang diteliti yang antara lain dilakukan melalui studi literatur, kepustakaan dan arsip/laporan seperti:

a.Data-data tentang rincian kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa dan kewenangan lainnya yang telah ada pada Desa;

b.Data-data tentang keadaan umum lokasi penelitian mencakup keadaan geografis, demografis.

### **Fokus Penelitian**

Penelitian tentang Evaluasi penggunaan dana desa di Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, maka penulis memfokuskan pada Evaluasi penggunaan dana desa yang sesuai dengan teori Dunn meliputi Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, Ketepatan di Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan.

Penggunaan dana desa tersebut dijabarkan dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, peraturan pemerintah dan berbagai peraturan menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Menteri Keuangan). Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut menjadi landasan desa dalam

rangka memanfaatkan dana desa dan melaksanakan pembangunan di desa.

Berdasarkan Permendes Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (pasal 3) : Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan di dua aspek yaitu pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat, Pemanfaatan dana desa dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa, meliputi:

- a. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
- b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
- c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
- d. Pemberdayaan masyarakat.

### **Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi instansi atau kantor penelitian ini sesuai dengan judul yang

penulis kemukakan adalah Kantor Desa Di Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

### **Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan proses pengadaan data primer untuk kebutuhan suatu penelitian. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

#### **Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui proses pengamatan. Pengamatan difokuskan pada jenis kegiatan dan peristiwa tertentu yang memberikan informasi dan pandangan benar-benar berguna (Moleong 2006:173) Menurut Marshall dalam Sugiyono (2013: 64) melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.

Dalam penelitian ini peneliti mengamati, merekam atau mencatat hasil-hasil dari pemanfaatan dana desa tersebut dalam rangka pembangunan di Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

#### **Wawancara**

Esterberg dalam Sugiyono (2006: 72) wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini didasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara mendalam yaitu suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara bertatap muka langsung dengan informan dengan maksud untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti dengan menggunakan metode wawancara mendalam, peneliti dapat memperoleh data yang lebih mendalam, terperinci dan gambaran jelas mengenai penggunaan dana desa untuk pembangunan di Desa Simpang Tanah Lapang.

Pengumpulan dokumen-dokumen, untuk mengumpulkan data dan informasi penunjang melalui berbagai dokumen berupa peraturan- peraturan serta segala hal yang berkaitan dengan dana desa.

#### **Metode Analisis Data**

Metode analisa dilakukan secara terus-menerus dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dilakukan dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya sampai dengan penarikan kesimpulan. Dalam

melaksanakan analisis data, peneliti mengacu pada beberapa tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman, antarlain:

## **HASIL PEMBAHASAN**

### **1.Kriteria efektifitas**

Efektifitas berkenaan dengan apakah suatu program mencapai hasil (akibat) yang diharapkan (maksimal), atau tercapainya suatu tujuan dari diadakannya suatu tindakan. Dalam penelitian “Evaluasi penggunaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi” berupa pencapaian target penggunaan dana desa oleh Desa Simpang Tanah Lapang pada tahun 2017 dan hambatan-hambatan dalam penggunaan dana desa di Desa Simpang Tanah Lapang. Berikut temuan dilapangan:

Pencapaian target penggunaandana desa di Desa Simpang Tanah Lapang, dapat menjadi tolak ukur efektifitas dari pengelolaan dana desa di Desa Simpang Tanah Lapang, terhadap hasil (akibat) yang diharapkan oleh pegawai aparatur pemerintahan Desa Simpang Tanah Lapang. Sudah sejauh mana aparatur desa sebagai pelaksana pengelolaan dana desa, dalam upaya pengelolaan dana desa di Desa Simpang Tanah Lapang secara maksimal.

Pada temuan di lapangan, penggunaan dana desa di Desa Simpang Tanah Lapang

memiliki tujuan seperti yang tercermin dari pernyataan dari pernyataan I-4, beliau mengatakan sebagai berikut:

*“Dengan adanya dana desa adalah untuk pemberdayaan, karena dana desa itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”.*

Disampaikan juga tujuan dana desa oleh I-3 sebagai berikut:

*“Dana desa untuk membangun desa, memberdayakan masyarakat dan meningkatkan perekonomian desa”.*

Kemudian tujuan dana desa juga disampaikan oleh I-5 sebagai berikut:

*“Dana desa untuk membangun infrastruktur, jalan desa, jembatan dan pembinaan masyarakat”.*

Dari ketiga pernyataan di atas bahwasannya dana desa untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa, dan diperjelas oleh pernyataan I-8 sebagai berikut:

*“Tujuan utama mensejahterakan masyarakat, terkait infrastruktur maupun ekonomi masyarakat”.*

Dari pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa pada temuan di lapangan, menunjukkan bahwa tujuan dari dana desa di Desa Simpang Tanah Lapang lebih kepada infrastuktur dan pemberdayaan kepada masyarakat. Selain tujuan dari penggunaan dana desa perencanaan kebijakan mempunyai peranan sangat

penting, artinya perencanaan ini berkaitan dengan apa yang akan dilakukan dan dikerjakan sehingga dapat suatu hasil yang baik, seperti perencanaan yang disampaikan oleh I-6 Sebagai berikut:

*“Tepat, tapi belum sempurna, tinggal menyempurnakan dari kekurangan-kekurangan seperti kurang ikutsertanya masyarakat dalam musyawarah, karena keterwakilan masyarakat masih 50% yang saya harapkan*

### **Kriteria Efisiensi**

Efisiensi menurut Dunn (2003;430), berkenaan dengan usaha apa saja yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah hubungan antara efektifitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektifitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

Efisiensi dalam penelitian tentang “Evaluasi penggunaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi” berkenaan dengan usaha apa saja yang dilakukan oleh pihak Desa Simpang Tanah Lapang sebagai pengelola dari dana desa di Desa Simpang Tanah Lapang

tersebut. Selain itu, dalam hal ini peneliti juga menganalisis efisiensi dana desa di Desa Simpang Tanah Lapang.

Adapun alur pencairan dana desa di Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, seperti temuan di lapangan hasil dari wawancara dengan narasumber I-3 sebagai berikut ini:

*“Penerimaan keuangan desa dari pusat yaitu kementerian keuangan kemudian kalo pencairannya ada pengajuan dari pemerintah desa melalui kecamatan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah”.*

Dari uraian di atas bahwa pencairan dana desa dari kementerian keuangan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan akan disalurkan ke pemerintahan desa, adapun untuk pencairannya desa mengajukan ke pihak kecamatan kemudian dari kecamatan mengajukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. sedangkan dalam penganggarannya Desa Simpang Tanah Lapang seperti yang sampaikan oleh narasumber I-1 berikut ini :

*“Pertama musdus dulu ditingkat dusun untuk menjaring aspirasi kemudian lanjut ke musdes ditingkat desa dan setelah itu baru kita menganggarkan. Untuk pecairan dana itu dari pemerintahan daerah ke desa”.*

## **Kriteria Kecukupan**

Kriteria Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

Dalam penelitian tentang “Evaluasi penggunaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi””, Kecukupan berkenaan dengan sejauhmana kebijakan dari dana desa di Desa Simpang Tanah Lapang tersebut dalam pencapaian target, dapat menurunkan permasalahan dimasyarakat Desa Simpang Tanah Lapang.

Adapun temuan dilapangan dipaparkan oleh narasumber I-8 sebagaiberikutini :

*“Iya, jalan sudah tidak becek lagi”.*

Kemudian disampaikan pula oleh narasumber I-8 bahwa :

*“Sangat membantu masyarakat Desa Simpang Tanah Lapang”.*

Hal yang sama juga disampaikan oleh I-8 berikut ini :

*“Iya sangat bermanfaat”.*

Dari ketiga narasumber di atas bahwa dana desa sangat bermanfaat bagi desa itu sendiri dan dapat membantu masyarakat. Dan disampaikan juga oleh narasumber I-8 bahwa :

*“Ada manfaatnya, tapi sementara ini manfaatnya masih disegi fisiknya saja, lebih kepada infrastruktur”.*

Narasumber I-8 menyampaikan perihal bahwa :

*“Kalau manfaat pasti ada, hanya belum terasa oleh masyarakat utuh dari pembangunan tersebut”.*

Kemudian pernyataan narasumber I-8 sebagai berikut :

*“Pastinya memberikan manfaat dari segi fisik”.*

Dari temuan narasumber dari masyarakat bahwa dana desa di Desa Simpang Tanah Lapang bermanfaat kepada bangunan fisik. Kemudian dari segi pelaksanaan penggunaan dana desa di Desa Simpang Tanah Lapang yang diuraikan oleh narasumber I-8 berikut ini :

*“Puas tidak puas memang masyarakat harus dirasakan puas”.*

Dan diperjelas oleh narasumber I-8 bahwa :  
*“Kalau saya pribadi tidak puas, karena saya tidak tahu dan belum melihat skala prioritas pembangunan, yang harus didahulukan tapi tidak didahulukan”.*

Dari kedua temuan narasumber ini bahwa dalam pelaksanaan penggunaan dana desa dirasa kurang puas. Selain itu kemudian dari segi laporan dan tanggungjawab juga hal yang amat penting terlebih seberapa puas laporan dan pertanggungjawaban.

Dari temuan di lapangan ketiga

narasumber di atas bahwa mereka adalah para BPD Desa Simpang Tanah Lapang yang menyatakan bahwa laporan dari Desa Simpang Tanah Lapang dalam hal pengelolaan dana desa, bagus dan memuaskan. Kemudian dari pertanggungjawaban dana desa di Desa Simpang Tanah Lapang seperti narasumber I-8 berikut uraikan :

*“Yang namanya manusia mungkin belum begitu puas, mungkin karena setiap manusia dalam hatinya ada sifat nafsu karena seberapa bagus dan maksimalnya pembangunan ini tidak akan ada puasnya, intinya masyarakat sudah merasakan pembangunan dari pemerintahan Desa Simpang Tanah Lapang dan harus disyukuri. Kalo bahagia mungkin bahagia tapi tidak 100%”.*

Dari uraian narasumber di atas kalo dirasa puas mungkin masih belum merasakan puas akan tetapi adanya pembangunan di Desa Simpang Tanah Lapang harus disyukuri oleh masyarakat.

### **Kriteria Perataan**

Kriteria perataan menurut Dunn (2003,430), era hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antar kelompok-kelompok yang berada dimasyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan.

Dalam penelitian tentang “Evaluasi penggunaandana desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Simpang Tanah LapangKecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi”, perataan berkenaan dengan, bagaimana dana desa didistribusikan.

Berikut ini pernyataan narasumber I-1 berikut ini :

*“Jadi tergantung usulan masyarakat, kemudian kita juga membagi- bagi anggaran disetiap RT”.*

Dan disampaikan pula oleh narasumber I-1 bahwa :

*“Kalau untuk jumlah dana desa tidak merata ada perbedaan selisih biasanya itu pertimbangan pemerintahan kabupaten dari segi melihat profil desa, besar kecilnya ditentukan dari pemerintahan kabupaten. Kalau pembagiannya dari Desa Simpang Tanah Lapang mematok dari skala prioritas musrembang dan musdus kira-kira wilayah mana yang diprioritaskan, tapi Desa Simpang Tanah Lapang tidak menganak tirikan yang lain dalam kata lain ada waktu gilirannya”.*

Dari uraian kedua narasumber temuan di lapangan bahwa anggaran dana desa sudah dibagi rata oleh desa untuk masing-masing wilayahnya dan tidak menganak tirikan wilayah lain, jika tahun ini tidak dibangun

karena ada yang lebih prioritas maka Desa Simpang Tanah Lapang akan membangun ditahun berikutnya artinya ada giliran anggaran dan pembangunan untuk wilayah yang ada di Desa Simpang Tanah Lapang. Seperti apa yang narasumber I-8 berikut ini sampaikan:

*“Pada hakekatnya adalah desa ini prioritasnya apa sih yang paling utama dibutuhkan oleh masyarakat, dari prioritas itu yang dibangun”.*

Dan disampaikan pula oleh narasumber I-2 bahwa :

*“Kalau secara program kita sudah adil sudah merata, maka BPD mendorong desa agar ada perwakilan maupun staf desa atau BPD. Kalau puas dan tidak puas itu dikembalikan kemasyarakat Desa Simpang Tanah Lapang”.*

Hal yang sama juga disampaikan oleh narasumber I-8 berikut ini :

*“Menurut saya sudah merata dan adil”.*

Dari ketiga narasumber di atas menegaskan bahwa pembangunan sesuai dengan prioritas desa, sudah merata dan adil. Untuk mengetahui suatu kondisi wilayah tertentu yang disampaikan oleh narasumber I-1 berikut ini :

*“Pemerintahan desa apabila mau membangun melihat dulu lokasi yang akan dibangun, kemudian menampung usulan masyarakat dan pemerintah Desa Simpang Tanah Lapang melihat anggaran cukup atau tidak, apabila tidak cukup maka*

*dianggarkan ditahun berikutnya”*

Hal senada juga disampaikan oleh narasumber I-3 Sebagai berikut :

*“Sudah, jadi sebelum dianggarkan pemerintahan Desa Simpang Tanah Lapang, survei lokasi dahulu sampai pengukuran dan tanya jawab dengan masyarakat”.*

Dari kedua narasumber bahwa sebelum membangun terlebih dahulu mensurvei dan mengecek lokasi yang akan dibangun, serta melakukan tanya jawab dan menampung aspirasi masyarakat. Sedangkan disampaikan pula oleh narasumber I-4 sebagai berikut:

*“Kalau BPD itu lebih kepada musdus bukan survei, di musdus seluruh komponen masyarakat dikumpulkan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat yang nanti akan diprogramkan”.*

Pernyataan temuan dari narasumber di atas bahwa komponen masyarakat dikumpulkan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat yang akan diprogramkan. Hal yang sama juga disampaikan oleh narasumber I-4 bahwa :

*“Tentu memantau, termasuk hasil usulan dari perwakilan masyarakat”.*

Pernyataan di atas menegaskan bahwa memantau setiap apa yang akan dikerjakan, termasuk dari hasil usulan masyarakat. Jadi apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah Desa Simpang Tanah Lapang dilakukan survei terlebih dahulu dan

menjaring aspirasi dimasyarakat.

### **E.Kesimpulan**

Penelitian mengenai “Evaluasi Penggunaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi”, berdasarkan teori evaluasi kebijakan menurut William Dunn, dapat disimpulkan belum mencapai tujuan umum dana desa yang telah ditetapkan.

Efektifitas; Kegiatan atau program dari anggaran dana desa di Desa Simpang Tanah Lapang sudah dilaksanakan yaitu pembangunan saluran drainase, pembangunan sumur bor dan pembangunan Gedung PAUD, dalam pelaksanaan pembangunannya efektif dan

sudah berjalan dengan baik, namun dalam perencanaan dan pengawasan penggunaan dana desa di Desa Simpang Tanah Lapang masih kurangnya partisipasi masyarakat serta koordinasi yang belum berjalan dengan baik.

Efisiensi: Dana desa di Desa Simpang Tanah Lapang menerima pencairan dana desa dalam dua tahap, tahap pertama 60 % dan kedua 40%, namun pada tahap kedua pencairan mengalami keterlambatan dari yang seharusnya di bulan Agustus tetapi terjadi di bulan Oktober sehingga kurang efisien dalam waktu pelaksanaannya, kemudian dalam pengumpulan dan penyusunan dokumen- dokumen sudah tertata dengan baik.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Moleong, j, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja

Nugroho, Riant. 2017. *Public Policy*. Jakarta: PT. Gramedia

Purwanto, suslistyastuti. 2015. *Implementasi kebijakanpubli*. Yogyakarta. Gava media

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses & Analisis Kebijakan*.

Yogyakarta : UNY Press

<https://docplayer.info/52628101-Pengawasan-dan-pengendalian-hewan-ternak-liar-oleh-dinas-peternakan-kabupaten-kuantan-singingi-tahun-oleh-zullia-fitriani.html>

<http://repository.ummat.ac.id/245/1/COVER-BAB%20III.pdf>